

ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM PEMERINTAH DALAM MENGURANGI PEKERJA ANAK : TINJAUAN DARI PERSPEKTIF EKONOMI PEMBANGUNAN

Arida Putri Khuzaeri¹, Wulan Agus Tiawinata²
khuzaeri31@gmail.com¹, wulanagustiawi@gmail.com²
Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas program pemerintah dalam mengurangi jumlah pekerja anak di Indonesia, dengan fokus pada perspektif industri yang sedang berkembang. Masalah pekerja anak merupakan isu yang kompleks, yang sangat terkait dengan kemiskinan, rendahnya akses terhadap pendidikan, serta ketidaksetaraan sosial. Dalam upaya mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program, seperti Program Harapan Keluarga (PKH), penyediaan pendidikan gratis, dan Program Eliminasi Pekerja Anak (PKBM) melalui Pusat Kegiatan Pembelajaran Masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan kajian literatur dari Biro Statistik (BPS) serta analisis data sekunder dan laporan mengenai Sumber Daya Manusia. Hasil analisis menunjukkan adanya penurunan jumlah pekerja anak dalam beberapa tahun terakhir, namun efektivitas program-program tersebut masih terbatas oleh ketidakmerataan distribusi dukungan, pengawasan yang kurang ketat, serta keterbatasan dalam sosialisasi terhadap program-program yang ada. Temuan dari penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi yang sinergis antara sektor bisnis, pendidikan, dan kebijakan sosial untuk mendukung pembangunan manusia yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ketidaksetaraan, Pendidikan, Masalah Pekerja Anak, Pemerintah.

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the effectiveness of government programs in reducing the number of child laborers in Indonesia, with a focus on the perspective of the emerging industry. The issue of child labor is a complex problem, closely linked to poverty, limited access to education, and social inequality. In an effort to address this issue, the Indonesian government has launched various programs, such as the Family Hope Program (PKH), the provision of free education, and the Child Labor Elimination Program (PKBM) through Community Learning Centers. With a qualitative approach, this research utilizes a literature review from the Bureau of Statistics (BPS) as well as secondary data analysis and reports on Human Resources. The analysis results show a decrease in the number of child laborers in recent years, but the effectiveness of these programs is still limited by uneven distribution of support, insufficient supervision, and limitations in the socialization of existing programs. The findings of this study emphasize the importance of synergistic collaboration between the business, education, and social policy sectors to support integrated and sustainable human development.

Keywords: *Inequality, Education, Child Labor Issues, Government.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Isu pekerja anak masih menjadi persoalan serius dalam proses pembangunan sosial-ekonomi Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menetapkan larangan kerja bagi anak di bawah usia 18 tahun, praktik eksploitasi anak dalam dunia kerja tetap ditemukan, terutama pada sektor-sektor seperti pertanian, industri rumahan, serta sektor informal yang sedang berkembang (ILO, 2020). Masalah ini tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor mendasar seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, dan ketimpangan sosial

yang melekat di berbagai wilayah.

Untuk menangani permasalahan tersebut, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program strategis. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat, penyediaan pendidikan tanpa biaya, serta inisiatif pengurangan pekerja anak melalui kegiatan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), merupakan bentuk-bentuk intervensi yang telah dilaksanakan secara nasional. Tujuan utama dari program-program ini adalah mendorong peningkatan kesejahteraan rumah tangga, memperkuat akses terhadap pendidikan formal, dan menarik anak-anak keluar dari dunia kerja untuk kembali menempuh pendidikan (Bappenas, 2022).

Namun demikian, tidak semua daerah merasakan dampak yang setara dari pelaksanaan program tersebut. Di sejumlah wilayah dengan aktivitas industri yang sedang berkembang, hambatan seperti distribusi bantuan yang tidak merata, pengawasan yang belum optimal, dan minimnya penyuluhan kepada masyarakat menjadi faktor penghambat utama. Evaluasi terhadap efektivitas program ini perlu dilakukan secara menyeluruh, terutama dengan mempertimbangkan karakteristik sosial ekonomi di daerah-daerah industri (BPS, 2023).

Penelitian ini dilakukan untuk menilai secara mendalam efektivitas berbagai kebijakan pemerintah dalam menekan angka pekerja anak di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis data sekunder dan telaah literatur. Dalam penelitian ini ditekankan pula pentingnya integrasi antara kebijakan sosial, peran sektor pendidikan, serta keterlibatan dunia usaha dalam menciptakan pembangunan manusia yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji sejauh mana kenijakan pemerintah berhasil dalam mengurangi kasus pekerja anak di Indonesia. Sumber data yang kami analisis sepenuhnya berupa data sekunder, yang mencakup dokumen resmi dari instansi pemerintah, laporan lembaga internasional seperti ILO, data dari BPS, serta publikasi ilmiah lainnya yang diterbitkan antara tahun 2018 hingga 2024.

Data diperoleh melalui penelaahan dokumen dan studi pustaka, yang mencakup kebijakan-kebijakan sosial terkait, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), pendidikan bebas biaya, dan program pendidikan nonformal untuk anak-anak pekerja. Selain itu, konteks sosial ekonomi dari wilayah-wilayah dengan perkembangan industri juga dikaji untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam.

Analisis dilakukan menggunakan pendekatan tematik, dengan mengelompokkan data berdasarkan pola dan hubungan antar unsur yang ditemukan. Untuk meningkatkan validitas, dilakukan perbandingan antar sumber (triangulasi) dari berbagai institusi terpercaya.

Adapun kriteria dalam memilih referensi meliputi:

- Sumber yang dikeluarkan oleh lembaga akademik atau resmi
- Penelitian yang fokus pada isu pekerja anak dan intervensi kebijakan
- Data yang relevan secara konteks dan mendukung analisis penelitian

Metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh terhadap keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pengentasan pekerja anak, serta memberikan masukan-masukan bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Intervensi Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan tiga inisiatif utama dalam rangka menekan angka pekerja anak, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Program Penghapusan Pekerja Anak (PPA-PKH), serta kebijakan Pendidikan Gratis dan Wajib Belajar 12 Tahun. Ketiga program ini dirancang secara terintegrasi guna mengatasi faktor-faktor struktural yang mendorong anak untuk bekerja, seperti kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pendidikan formal.

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Sebagai skema bantuan tunai bersyarat (*conditional cash transfer/CCT*), PKH memberikan insentif keuangan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan syarat anak mereka bersekolah dan mengikuti layanan kesehatan secara rutin. Bantuan tersebut terdiri dari dua bentuk, yakni bantuan tetap per keluarga sebesar Rp550.000 hingga Rp1.000.000 per tahun, serta bantuan tambahan seperti Rp2,4 juta bagi ibu hamil dan Rp900.000 untuk anak tingkat sekolah dasar (Kementerian Sosial, 2023).

Suryadi (2020) menunjukkan bahwa program ini mampu menurunkan angka putus sekolah hingga 12% di wilayah perkotaan. Namun, efektivitasnya cenderung menurun di daerah terpencil karena keterbatasan sarana pendidikan dan layanan kesehatan (Patria, 2022).

Dari sudut pandang teori modal manusia (*human capital*), pendekatan ini sesuai dengan pandangan Becker (1964) yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan produktivitas. Meski demikian, pelaksanaan PKH masih menghadapi kendala seperti ketidaktepatan data penerima dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta rendahnya pemahaman finansial di kalangan penerima manfaat.

2. Program Penghapusan Pekerja Anak (PPA-PKH)

Program ini menyasar anak-anak dari keluarga PKH yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya, seperti di sektor pertanian, manufaktur, dan kerja domestik. Melalui pendekatan pendidikan nonformal berbasis komunitas yang dijalankan lewat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), program ini berupaya mengembalikan anak-anak tersebut ke jalur pendidikan. Misalnya, PKBM Cendikia di Lampung Tengah berhasil mereintegrasikan 80% dari 150 peserta ke sistem pendidikan formal dengan menggunakan kurikulum kesetaraan Paket B dan C (Hariyadi & Nofita, 2021).

Selain menyediakan shelter sementara, program ini juga menawarkan pendampingan berbasis komunitas. Kementerian Ketenagakerjaan (2023) mencatat bahwa sejak 2008 hingga 2023, sebanyak 134.456 anak telah berhasil ditarik dari dunia kerja.

Namun demikian, intervensi ini belum sepenuhnya menjangkau anak-anak yang bekerja di sektor informal perkotaan, seperti pedagang kaki lima dan pengemis, yang sebagian besar luput karena terbatasnya anggaran PKBM dan lemahnya koordinasi lintas sektor.

Kebijakan Pendidikan Gratis dan Wajib Belajar 12 Tahun Ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 dan diperkuat dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan ini menjamin pembebasan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, baik di sekolah negeri maupun swasta. Di DKI Jakarta, data Dinas Pendidikan (2023) menunjukkan peningkatan angka partisipasi sekolah (APS) usia 13–15 tahun dari 89% pada 2019 menjadi 93% pada 2023.

Namun, keterbatasan jumlah kursi di sekolah negeri, seperti hanya tersedia 29.000 kursi SMA di Jakarta pada tahun ajaran 2024, dapat menyebabkan anak-anak dari latar belakang miskin tereliminasi dalam persaingan akademik (Simanjuntak, 2023).

Kebijakan ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 4 tentang Pendidikan Berkualitas, tetapi membutuhkan dukungan lanjutan berupa perluasan akses pendidikan inklusif dan peningkatan kapasitas guru untuk mendukung keberhasilan reintegrasi anak-anak mantan pekerja ke dunia pendidikan.

Tabel 1. Sintesis Program Pengurangan Pekerja Anak

Program	Mekanisme	Pencapaian	Tantangan
PKH	Bantuan tunai	12% menurun putus sekolah	Ketidakmerataan distribusi
PPA-PKH	Pendidikan nonformal (PKBM)	134.456 anak direintegrasi	Minimnya jangkauan sektor informal
Wajib Belajar 12 Tahun	Pendidikan gratis	APS meningkat 4% (2019–2023)	Kuota sekolah terbatas

Sumber (BPS, Kemnaker)

3. Analisis Kebijakan

Ketiga program ini menunjukkan adanya pendekatan multidimensional dalam mengatasi isu pekerja anak. PKH memberikan dukungan finansial, PPA-PKH menawarkan solusi langsung melalui pendidikan nonformal, dan program wajib belajar memperkuat akses pendidikan secara menyeluruh. Namun, menurut Pflug & Juliand (2024), keberhasilan program secara berkelanjutan memerlukan kepastian pendanaan dan sinkronisasi data lintas kementerian.

B. Analisis Data Statistik

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa jumlah pekerja anak berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 mengalami perubahan yang fluktuatif dan memerlukan perhatian serius. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 1,05 juta anak terlibat dalam aktivitas kerja. Angka ini turun tipis menjadi 1,01 juta pada 2022, namun kembali meningkat pada 2023 menjadi 1,03 juta. Dari sisi persentase, jumlah pekerja anak masih tergolong tinggi, berkisar antara 7,9% hingga 10,22%. Meskipun secara keseluruhan terjadi penurunan, fakta ini menandakan bahwa permasalahan pekerja anak belum dapat diatasi secara menyeluruh.

Ketimpangan antarwilayah tampak mencolok. Beberapa provinsi di kawasan timur Indonesia, seperti Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), secara konsisten mencatatkan angka pekerja anak di atas 15%. Sebaliknya, provinsi dengan pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih maju, seperti DKI Jakarta, menunjukkan angka yang jauh lebih rendah, yakni hanya 1,76% pada 2022. Perbedaan ini menunjukkan bahwa distribusi pembangunan yang belum merata berdampak langsung pada tingginya keterlibatan anak dalam dunia kerja di wilayah-wilayah tertinggal.

1. Interpretasi Sosial terhadap Tren Pekerja Anak

Jumlah pekerja anak sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Selama masa pandemi COVID-19, khususnya tahun 2020–2021, jumlah pekerja anak melonjak hingga 1,33 juta orang. Peningkatan tajam ini mencerminkan tekanan ekonomi yang dihadapi banyak keluarga miskin, yang pada akhirnya mendorong anak-anak mereka untuk turut bekerja demi menopang penghasilan keluarga.

Meskipun angka tersebut menurun menjadi 1,03 juta pada 2023, jumlah ini tetap lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi yang hanya mencapai 0,92 juta pada 2019.

Ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari pandemi masih menyisakan kerentanan dalam rumah tangga miskin. Beberapa faktor utama yang menyebabkan anak-anak bekerja meliputi tidak stabilnya pendapatan keluarga, keterbatasan akses pendidikan—terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar)—di mana hanya sekitar 65,3% anak di pedesaan yang mampu menyelesaikan pendidikan tingkat SMP, serta pengaruh budaya lokal yang masih menganggap bekerja sejak usia muda sebagai hal yang lumrah, khususnya dalam sektor pertanian dan pekerjaan informal.

2. Ketimpangan Wilayah

Perbedaan kondisi antara wilayah perkotaan dan pedesaan sangat memengaruhi angka pekerja anak. Berdasarkan data BPS tahun 2022, tingkat pekerja anak di wilayah pedesaan mencapai 11,90%, sedangkan di wilayah perkotaan hanya 5,72%. Hal ini juga tercermin dari capaian pendidikan, di mana rata-rata lama sekolah anak-anak di desa hanya 7,1 tahun, lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak di kota yang mencapai 9,2 tahun.

Provinsi seperti Papua (20,43%), NTT (18,74%), dan Gorontalo (17,2%) menunjukkan angka pekerja anak tertinggi. Ini menandakan bahwa masalah pekerja anak terkonsentrasi di wilayah dengan akses pendidikan terbatas, lapangan kerja orang dewasa yang minim, dan program perlindungan sosial yang belum maksimal. Sebaliknya, provinsi seperti Jawa Barat (4,1%) dan DKI Jakarta (1,76%) mencerminkan kondisi yang lebih baik, ditopang oleh infrastruktur sosial yang lebih maju. Ketimpangan ini memperlihatkan adanya persoalan struktural dalam pembangunan yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan masalah pekerja anak.

3. Evaluasi Program Pemerintah

Program-program perlindungan sosial yang diluncurkan pemerintah, seperti PKH dan PPA-PKH, memang telah memberikan kontribusi positif, namun cakupan dan efektivitasnya masih terbatas. Misalnya, PKH berhasil mengurangi sekitar 16.000 pekerja anak melalui syarat wajib sekolah bagi penerima bantuan, tetapi program ini baru menjangkau sekitar 10% dari total rumah tangga miskin ekstrem, sehingga dampaknya belum masif.

Di sisi lain, implementasi PPA-PKH di Kabupaten Magelang menunjukkan hasil yang menggembirakan, dengan sekitar 85% anak penerima berhasil kembali ke sekolah. Meski demikian, perluasan program ini ke wilayah 3T masih menemui kendala besar, terutama keterbatasan tenaga pendamping di lapangan yang memainkan peran penting dalam keberhasilan program.

Selain itu, kebijakan pendidikan gratis 12 tahun belum sepenuhnya merata. Salah satu contohnya adalah dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) yang hanya mencakup 6,7 juta siswa dari total 11,2 juta siswa jenjang SMA/SMK. Kesenjangan ini membuat anak-anak dari keluarga miskin terhambat melanjutkan pendidikan dan menjadikan bekerja sebagai pilihan untuk bertahan hidup.

C. Tantangan Implementasi Program di Lapangan

Pelaksanaan program pemerintah untuk menekan angka pekerja anak di Indonesia menghadapi sejumlah kendala multidimensional yang saling terkait, mencakup persoalan struktural, sosial budaya, hingga hambatan geografis dan logistik. Kompleksitas tantangan ini berdampak langsung pada efektivitas program, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

1. Kendala Struktural

Permasalahan birokrasi yang berbelit dan lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program. Banyak kebijakan masih berjalan secara sektoral tanpa integrasi data dan aksi lintas kementerian atau lembaga, sehingga

terjadi tumpang tindih atau kesenjangan intervensi. Selain itu, pendataan pekerja anak di sektor informal—seperti pertanian, perdagangan kecil, dan pekerjaan domestik—masih belum akurat, menyebabkan banyak anak yang seharusnya menjadi sasaran program justru terlewatkan.

Di tingkat daerah, terbatasnya jumlah dan kapasitas tenaga pelaksana yang memiliki pelatihan memadai juga memperlambat proses identifikasi dan rehabilitasi anak. Para petugas di lapangan kerap menghadapi beban kerja tinggi dengan dukungan infrastruktur dan pelatihan yang sangat terbatas.

2. Kendala Sosial Budaya

Di banyak wilayah, khususnya daerah pedesaan dan 3T, praktik kerja anak masih dipandang sebagai hal lumrah dan menjadi bagian dari kontribusi ekonomi keluarga. Pandangan ini seringkali diperkuat oleh ketidakpercayaan terhadap manfaat pendidikan formal, terutama ketika prospek kerja pasca sekolah dianggap minim.

Khusus untuk anak perempuan, norma budaya dan stereotip gender menambah tantangan tersendiri, di mana pendidikan sering kali tidak dianggap prioritas. Sosialisasi program-program pemerintah belum sepenuhnya mampu menggeser pandangan masyarakat, sehingga resistensi terhadap intervensi baik dalam bentuk bantuan sosial maupun program pendidikan masih tinggi.

3. Hambatan Geografis dan Logistik

Distribusi layanan di wilayah terpencil, pulau-pulau kecil, serta daerah dengan infrastruktur terbatas menghadapi kendala serius. Kondisi geografis yang sulit dijangkau membuat penyaluran bantuan, pengawasan pekerja anak, dan pelaksanaan pendidikan menjadi tidak merata.

Selain terbatasnya akses transportasi dan komunikasi, tantangan ini juga berdampak pada kesulitan merekrut dan mempertahankan tenaga pengajar atau pendamping yang bersedia bertugas di lokasi-lokasi terpencil. Akibatnya, pelaksanaan program seringkali tidak berkelanjutan atau bahkan gagal menjangkau kelompok sasaran yang paling rentan.

Secara umum, tantangan pelaksanaan program pengurangan pekerja anak mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih terkoordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal, serta inovasi dalam intervensi berbasis komunitas. Tanpa perbaikan menyeluruh terhadap hambatan ini, upaya eliminasi pekerja anak berisiko stagnan dan tidak merata di seluruh Indonesia.

D. Tinjauan Ekonomi Pembangunan

Dampak terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Jangka Panjang Keberadaan pekerja anak berdampak signifikan terhadap penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam jangka panjang. Keterlibatan anak dalam dunia kerja menyebabkan hilangnya akses terhadap pendidikan formal, yang esensial bagi pengembangan kapasitas dan kompetensi individu. Akibatnya, anak-anak tersebut berisiko besar untuk tetap berada dalam sektor informal dengan pendapatan rendah saat memasuki usia dewasa. Prof. Nunung Nurwati dari Universitas Padjadjaran menyatakan bahwa pekerja anak menghasilkan SDM yang tidak kompetitif dalam skala global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2021), sebanyak 40% pekerja anak mengalami putus sekolah, yang berdampak negatif terhadap produktivitas di masa mendatang. Teori Human Capital yang dikemukakan oleh Becker (1965) menekankan pentingnya pendidikan sebagai bentuk investasi dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Namun, pekerja anak kehilangan peluang tersebut, sehingga memperkuat lingkaran kemiskinan antargenerasi.

1. Hambatan terhadap Produktivitas Nasional

Pekerja anak menjadi salah satu faktor penghambat peningkatan produktivitas nasional akibat kurangnya tenaga kerja terampil dan berkualitas. Data International Labour Organization (ILO, 2021) menunjukkan bahwa produktivitas pekerja di Indonesia hanya mencapai \$12,96 per jam, tertinggal jauh dibandingkan dengan Singapura (\$44,01) dan Malaysia (\$18,85). Rendahnya produktivitas ini berkorelasi erat dengan tingginya angka pekerja anak di sektor informal, yang umumnya tidak menyediakan pelatihan maupun pengembangan keterampilan. Wilayah dengan prevalensi pekerja anak yang tinggi, seperti Papua (20,43%) dan Nusa Tenggara Timur (18,74%), juga mencatat rata-rata lama sekolah yang rendah, yaitu hanya delapan tahun. Hal ini memperdalam ketimpangan produktivitas antarwilayah dan menjadi hambatan struktural dalam transisi menuju ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

2. Biaya Sosial dan Ekonomi dari Pekerja Anak

Dampak pekerja anak tidak hanya dirasakan dalam sektor ekonomi, tetapi juga menimbulkan beban sosial yang signifikan. Beberapa konsekuensi tersebut meliputi:

Beban kesehatan: Anak yang bekerja cenderung mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental, yang pada akhirnya meningkatkan beban pada sistem pelayanan kesehatan nasional.

Kerugian ekonomi: Studi Yayasan Pendidikan Indonesia (2001) mengungkapkan bahwa meskipun 20% pendapatan keluarga bergantung pada kontribusi pekerja anak, kerugian jangka panjang akibat hilangnya potensi SDM jauh lebih besar dan bersifat struktural.

Perlambatan pembangunan: Lonjakan jumlah pekerja anak selama pandemi COVID-19 mencapai 1,33 juta pada tahun 2020 menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Pengurangan kontribusi pada ekonomi digital: Anak-anak yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu (470.000 kasus pada 2019) kehilangan waktu belajar yang substansial, sehingga tidak mampu beradaptasi dengan tuntutan ekonomi digital yang tengah berkembang.

Untuk menghentikan siklus ini dan membangun sumber daya manusia yang kompetitif pada tahun 2045, diperlukan intervensi yang menyeluruh melalui peningkatan akses pendidikan, penguatan ekonomi keluarga, dan penegakan hukum.

KESIMPULAN

Program-program pemerintah seperti PKH dan PPA-PKH telah memberikan dampak positif dalam mengurangi jumlah pekerja anak dan meningkatkan partisipasi anak dalam pendidikan di Indonesia. Meskipun demikian, efektivitasnya masih terbatas karena hambatan, seperti distribusi bantuan yang tidak merata, pengawasan yang kurang ketat, serta tantangan geografis dan sosial budaya, terutama di wilayah 3T dan daerah terpencil. Data menunjukkan bahwa jumlah pekerja anak cenderung fluktuatif dan meningkat selama pandemi COVID-19, menandakan kerentanan ekonomi keluarga dan ketimpangan wilayah yang cukup signifikan. Untuk mengatasi masalah pekerja anak secara lebih efektif, diperlukan pendekatan yang terkoordinasi dan inovatif. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan distribusi bantuan, serta sosialisasi program yang lebih luas dan efektif menjadi kunci utama. Selain itu, reformasi kebijakan yang menyeluruh dan penanganan masalah struktural serta sosial budaya sangat penting agar program dapat mencapai hasil yang lebih optimal, mengurangi

pekerja anak secara signifikan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayudhia Nur Luthfia, Nabila Putri Wahiddiyah, Desy Safitri, & Sujarwo Sujarwo. (2023). Analisis Problematika Pendidikan Indonesia Di Wilayah 3T. *Guruku: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 36–46. <https://doi.org/10.59061/guruku.v1i4.491>.
- Baiq Dewi Kamariani, Nur Fitri Eka Asbarini, Asrifia Ridwan, & Abdul Chalel Rahman. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Administrative and Social Science*, 5(1), 205–219. <https://doi.org/10.55606/jass.v5i1.929>.
- BPS. (2022). *Pekerja Anak di Indonesia 2022: Sebelum dan Semasa Pandemi COVID-19*. Bps, 4(2), 129–136.
- Candrawati, C., & Auwalin, I. (2024). Impact of Program Keluarga Harapan on Child Labor During Covid-19. *Economics Development Analysis Journal*, 13(2), 179–193. <https://doi.org/10.15294/edaj.v13i2.78971>.
- Cep Kiki Kusumah. (2021). 12-Years Compulsory Education Policy and Education Participation Completeness: Evidence from Indonesia. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 2(2), 187–201. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v2i2.138>
- Comission, E. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 4(1), 1–23.
- Depnakertrans RI. (2005). Modul Penanganan Pekerja Anak. *Jurnal Metodologi Pembangunan, Pekerja Anak*, 72. http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_120565.pdf.
- Edi, S. (2006). Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. *Diklat Jabatan Fungsional Pekerja Sosial*, 1–18.
- Forward, T. H. E. R. (1999). Child labour. In *Bmj* (Vol. 318, Issue 7184). <https://doi.org/10.1136/bmj.318.7184.642a>.
- Hafid. M.Pd, D. H. A., Rapanna MSi, D. P., Radja M.Si, D. M. J., Sahban MM, D. H., & SP MM, D. M. (2024). the Role of Non-Formal Education in Building Socio-Economic Independence in Indonesia. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 06(03), 205–215. <https://doi.org/10.56293/ijmsssr.2024.5024>.
- ILO. (2009). Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak/ International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC). https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_144313.pdf
- International Labour Office. (2016). *Trade Unions and Child Labour*.
- Iryani, B. S., Priyarsono, D. S., Prajnaparamita, K., Bong, M. E., Banindro, B. S., Yulianto, Y. H., Biantoro Andrian; Arini Maer Arina Mayangsari; Dektisa H, B. D., Gunawan, A. P., Ii, B. A. B., Pustaka, T., Mawardati, Si, M., Wahyuni, Y. S., Internasional, O. P., Prabawati, E. D., Khamil, I., Nugraha, D. D., Schwarz, P., Body, J. J., ... Terán Torres., V. G. (2002). Garis Besar Pemantauan Pekerja Anak. *Jurnal DKV Adiwarna*, 1(1), 1–16. <http://repository.radenfatah.ac.id/4239/%0Ahttps://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/171/6/727.xml%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.008%0Ahttp://studentjournal.petra.ac.id/index.php/dkv/article/view/1812%0Afile:///C:/Users/adity/Downloads/>.
- Kamilah, N., Soeaidy, S., & Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat, D. (2014). Perencanaan Terpadu Penanganan Pekerja Anak (Studi Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat). *Wacana*, 17(2), 97–104. <https://media.neliti.com/media/publications/40104-ID-perencanaan-terpadu-penanganan-pekerja-anak-studi-pada-dinas-sosial-tenaga-kerja.pdf>
- Lee, K. W., & Hwang, M. (2016). Conditional cash transfer against child labor: Indonesia Program Keluarga Harapan. *Asia Pacific Education Review*, 17(3), 391–401. <https://doi.org/10.1007/s12564-016-9436-7>.
- Magdalena, F., Sukamdi, & Rofi, A. (2022). Potret Tenaga Kerja Anak Indonesia the Portrait of

- Indonesian Child Labour. *Jurnal Sosio Informa*, 8(2), 187–202.
- Nandi, N. (2016). Pekerja Anak Dan Permasalahannya. *Jurnal Geografi Gea*, 6(1). <https://doi.org/10.17509/gea.v6i1.1731>.
- Rostyaningsih, D. (2015). Implementasi Program Penarikan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (Ppa-Pkh) Di Kabupaten Magelang. *Gema Publica*, 1(1), 15. <https://doi.org/10.14710/gp.1.1.2015.15-30>.
- Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Wijaksono, A., Purnaweni, H., & Lestari, H. (2013). Artikel Implementasi Kebijakan Tentang Pekerja Anak Dan Penanggulangannya Di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 2(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/2501>.
- Yanti, N., Nurtati, N., & Misharni, M. (2020). Investasi Modal Manusia Bidang Pendidikan: Dampak Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(1), 21–37. <https://doi.org/10.35906/jep01.v6i1.504>
- Yogyakarta, M. (2015). Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, NIM : 20130520378.